BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK

ANGKA KELAHIRAN

KEPEMILIKAN KTP EL DAN AKTA

JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS

KOMPOSISI STATUS PERKAWINAN

ANGKA KEMATIAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG

SAMBUTAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat menyelesaikan penyusunan "Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2025". Buku Profil Kependudukan ini berisi 7 bab antara lain, Pendahuluan, Gambaran Umum Kabupaten Rembang, Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Penutup.

Buku profil ini dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi permasalahan kependudukan yang diperlukan oleh para perumus kebijakan, perencana, pengambil keputusan terutama dalam mengintegrasikan aspirasi dan kepentingan dalam proses pembangunan segala bidang. Sebagian data yang dipergunakan dalam buku ini berasal dari segala OPD yang berkaitan dengan masalah kependudukan di Kabupaten Rembang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan, mengolah, dan menganalisis data profil perkembangan kependudukan ini. Masukan dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan, dan akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rembang, Mei 2026
Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir.MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Rembang tahun 2025 disusun dengan mengacu pada amanat yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan setiap tahun. Buku profil memberikan informasi mengenai data kependudukan sebagai penunjang dalam penyusunan kebijakan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Pasal 83 ayat (1) yaitu "Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan".

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun berdasarkan Data Konsolidasi dan Pembersihan dari Kementerian Dalam Negeri Semester 2 (dua) tahun 2025 dan Data Pelayanan Pencatatan Sipil dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2025 serta data kependudukan dari lintas sektor terkait di Kabupaten Rembang. Informasi dalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi perkembangan kependudukan di Kabupaten Rembang dalam berbagai aspek sehingga mendukung terlaksananya pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan di Kabupaten Rembang.

Masukan, saran dan kerjasama terpadu dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang di tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Penyusunan 1
2. Tujuan 2
3. Ruang Lingkup 2
4. Sumber Data 2

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 4

1. Letak Geografis 4
2. Kondisi Demografis 6
3. Gambaran Ekonomi 6
4. Potensi Daerah 7
5. Visi dan Misi 8
6. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang.....9

BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 10

1. Kuantitas Penduduk 10
2. Jumlah Penduduk dan Persebaran Penduduk 10
   a. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin 10
   b. Kepadatan Penduduk 11
   c. Laju Pertumbuhan Penduduk 12
3. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi 14
   a. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 14
   b. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 16
   c. Rasio Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio).....18

4. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial 19
   a. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan 19
   b. Rata – Rata Umur Kawin Pertama (Singulate Mean Age at Marriage) 21
5. Kelahiran (Fertilitas) 22
   a. Angka Kelahiran Kasar 23
6. Kematian (Mortalitas) 24
   a. Angka Kematian Kasar 25

BAB IV KUALITAS PENDUDUK 27

1. Kesehatan 27
2. Pendidikan 28
3. Ekonomi 29
   a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja 30
4. Sosial 31
   a. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas 32

BAB V MOBILITAS PENDUDUK 33

BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 36

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 37
2. Kepemilikan Akta 38
   a. Akta Kelahiran 38
   b. Akta Kematian 40
   c. Akta Perkawinan 41
   d. Akta Perceraian 42

BAB VII PENUTUP 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rembang.....5

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Rembang 15

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 2024..... 11
Tabel 3.2 Rasio Kepadatan Penduduk Persentase per Kecamatan..... 12
Tabel 3.3 Angka Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan..... 13
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin..... 14
Tabel 3.5 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Rembang.....17
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Rembang.....18
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....20
Tabel 3.8 Angka Perkawinan Sesuai Kelompok Umur 20
Tabel 3.9 Persentase Lajang 21
Tabel 3.10 Angka Kelahiran Kasar Per Kecamatan 23
Tabel 3.11 Jumlah Kematian Kasar..... 25
Tabel 4.1 Angka Child Woman Ratio (CWR)..... 28
Tabel 4.2 Angka Partisipasi Sekolah Murni dan Angka Partisipasi Sekolah Kasar.... 29
Tabel 4.3 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan 30
Tabel 4.4 Penduduk Penyandang Disabilitas Tahun 2025..... 32
Tabel 5.1 Angka Migrasi Masuk per Kecamatan..... 34
Tabel 5.2 Angka Migrasi Keluar per Kecamatan..... 34
Tabel 5.3 Angka Migrasi Neto per Kecamatan 35
Tabel 6.1 Persentase Kepemilikan KTP-el 38
Tabel 6.2 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran..... 39
Tabel 6.3 Persentase Kepemilikan Akta Kematian..... 40
Tabel 6.4 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan..... 41
Tabel 6.5 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian..... 42

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penyusunan

Pemerintah melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Data Kependudukan dan potensi yang dimiliki daerah merupakan aspek penting dalam perencanaan program pembagunan suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Rembang. Dengan visi-misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang valid, lengkap, akurat, meliputi jumlah, struktur pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama serta lingkungan penduduk. Adanya perencanaan yang baik diharapkan pembangunan di Kabupaten Rembang bisa berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan untuk kesejahteraan penduduk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, baik yang menyangkut masalah kependudukan, potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, guna penyediaan data dan informasi kependudukan sebagai acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ditegaskan pula dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyususunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka penyusunan buku Profil Kependudukan Tahun 2025 Kabupaten Rembang ini bersumber dari database SIAK Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik

Indonesia Semester II Tahun 2025 serta dari lintas sektoral terkait.

2. Tujuan

Penyajian dan pengolahan data registrasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data dari lintas sektor terkait lainnya dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025 ini bertujuan untuk :

1. Memberi gambaran umum tentang kondisi geografis dan demografis, potensi, perkembangan dan prospek kependudukan di wilayah Kabupaten Rembang;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Rembang;
3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai Instansi pelaksana Administrasi Kependudukan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2025 berskala Provinsi.

Buku Profil Kependudukan diharapkan dapat dipergunakan sebagai rekomendasi dalam menyusun Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rembang.

3. Ruang Lingkup

Profil perkembangan kependudukan Kabupaten Rembang, mencakup gambaran umum wilayah Kabupaten Rembang, data kuantitatif yang berkaitan dengan kuantitas Penduduk, pengembangan kualitas penduduk, mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan serta gambaran permasalahan terkait kependudukan sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) operasional status hingga 31 Desember 2025 yang telah dikonsolidasikan oleh Dirjen Dukcapil

Kementrian Dalam Negeri. Data Pendukung adalah data terkait kependudukan dari lintas sektoral.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Letak Geografis

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, di timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur), Kabupaten Blora di sebelah selatan, serta di barat berbatasan dengan Kabupaten Pati. Menurut letak geografisnya, Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, pada koordinat 111°00'-111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°06' Lintang Selatan, sehingga bisa dikatakan sebagai gerbang timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yaitu Kecamatan Sarang, sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah Perbukitan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Adapun pada sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem pada ketinggian 806 meter, yang kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang memiliki luas 1.036 KM^2 yang tediri atas 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rembang adalah 294 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 287 Desa dan 7 Kelurahan dengan seluruh Kelurahan (7 Kelurahan) terletak di Kecamatan Rembang. Tiga Kecamatan terluar di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Sale (109,01 km^2), lalu disusul oleh Kecamatan Bulu (101,10 km^2), dan selanjutnya Kecamatan Sarang (92,86 km^2). Sedangan Kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Sluke (28,28 km^2), Kecamatan Pancur (43,00 km^2), kemudian Kecamatan Lasem (46,23 km^2)

Kabupaten Rembang beriklim tropis basah dan kering dengan dua pola musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Rembang berlangsung pada periode November hingga April sebagai akibat dari hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air. Sementara itu, musim kemarau di Rembang terjadi pada periode Mei hingga Oktober sebagai akibat dari tiupan angin monsun timuran yang bersifat kering dan sangat sedikit membawa uap air. Suhu udara di wilayah Rembang

berkisar antara 23° - 34° C dengan tingkat kelembapan relatif antara 60% - 90%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah (56,83%), yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif tinggi.

Terdapat 3 Kecamatan di Kabupaten Rembang yang beberapa wilayahnya berada di ketinggian >700 mdpl yaitu Kecamatan Sedan, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Kragan. Sedangkan Kecamatan dengan rata-rata mdpl terendah berada di Kecamatan Kaliori (0-25 mdpl) dan Kecamatan Rembang (0-50 mdpl).

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dan dam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi, dari jumlah tersebut, tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Rembang

2. Kondisi Demografis

Kabupaten Rembang yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 669.145 jiwa yang terdiri penduduk laki-laki sebanyak 335.857 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 333.288 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,77. Rasio ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Agama yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu/Penghayat Kepercayaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Rembang memeluk agama Islam dengan persentase 99,14%, dan sebagian lainnya memeluk agama lain dan sebagian kecil lain menganut Penghayat Kepercayaan.

Dari segi distribusi penduduk, Kecamatan Rembang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 93.392 jiwa, sedangkan Kecamatan Gunem memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 25.360 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang cukup tinggi dengan kepadatan penduduk sebesar 646 jiwa/km^2, sedikit meningkat dibandingkan pada tahun 2024.

Fenomena bonus demografi mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jumlah usia produktif sebesar 463.728 jiwa , sedangkan usia tidak produktif sebesar 205.417 jiwa.

3. Gambaran Ekonomi

Jalan adalah prasarana pengangkutan yang paling utama dalam menggerakkan roda perekonomian, semakin besar kegiatan perekonomian yang berjalan semakin dibutuhkan akses jalan guna memudahkan mobilitasi penduduk dan memperlancar lalu lintas barang. Panjang jalan di Kabupaten Rembang yang mencapai 703,57 km yang merupakan jalan negara, provinsi dan jalan kabupaten, memiliki kurang lebih 9 terminal yang tersebar di beberapa kecamatan.

Jumlah pasar pada tahun 2025 adalah 145 unit. Pasar tradisional pada tahun 2024 yang ada di Kabupaten Rembang saat ini berjumlah 43 tersebar di seluruh kecamatan secara merata dan berkembang dengan pesat. Pasar yang ada tersebut terdiri dari pasar umum, pasar desa, pasar

hewan, dan pasar buah. Pasar umum dan pasar desa adalah pasar yang paling banyak terdapat di Kabupaten Rembang sebanyak 39 unit. Sedangkan untuk pasar buah dan pasar hewan sebanyak 4 unit. Jumlah toko modern yang ada saat ini berjumlah lebih kurang lebih 102 toko modern yang tersebar di beberapa kecamatan dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin ramainya perekonomian di Kabupaten Rembang.

Dari sisi investasi, total realisasi investasi Kabupaten Rembang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 1,48 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2024. Investasi terbesar terdapat pada sektor pertambangan, listrik air, gas, perumahan, transportasi, dan industri. Sedangkan untuk nilai ekspor pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 1,23 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di Kabupaten Rembang berada di angka 5,77 persen. Pertumbuhan ekonomi ini memiliki tren positif dari tahun 2021 yang sebesar 3,85 persen dan mengalami kenaikan hingga tahun 2025 ini. Struktur ekonomi Rembang pada tahun 2025 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 24,18 persen, diikuti oleh Pertanian sebesar 22,82 persen, Perdagangan 13,13 persen, Konstruksi 8,37 persen, dan Pendidikan 5,76 persen. Dominasi industri pengolahan menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari yang semula sangat bertumpu pada sektor primer menuju ekonomi yang lebih berbasis pengolahan.

4. Potensi Daerah

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar dengan wilayah pantai sepanjang ± 62,5 km. Di dalamnya terkandung berbagai potensi hasil laut dan yang cukup melimpah, dengan jenis yang dominan adalah ikan layang, kembung, selar, manyung, layur, kakap, tongkol, cumi- cumi, kurisi, teri, tunul, mermang dan rajungan. Selain itu, ditunjang dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk yang tinggal di sepanjang pantai adalah nelayan dari pengolahan hasil laut.

Potensi pertanian Kabupaten Rembang yaitu meliputi produk tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan dengan produk unggulan meliputi palawija yaitu kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu. Sedangkan tanaman hortikultura yaitu kacang panjang, bawang merah dan cabe. Adapun buah-buahan produk unggulannya

adalah mangga, melon, durian ceriwik, duku woro serta tidak ketinggalan tanaman kawis dan siwalan yang sangat jarang ditemui diluar Kabupaten Rembang.

Selain produk pertanian dan perkebunan, potensi lain yang telah dikembangkan dan menjadi salah satu penyumbang PAD kabupaten rembang adalah batik lasem. Batik lasem merupakan akulturasi budaya jawa dan tiongkok yang dapat dilihat dari coraknya yang memiliki khas unik serta warna- warni yang menarik dan berani, jumlah pengrajin batik lasem saat ini mencapai kurang lebih 80 pengrajin yang tersebar diseluruh Kabupaten Rembang.

Adapula makanan khas yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri dan menjadi produk unggulan juga, seperti lontong tuyuhan, dumbeg, kaoya dudul, legen, kelo mrico, mangut, sate srepeh, urap latoh. Makanan dan minuman tersebut merupakan makanan khas dari Kabupaten Rembang yang setiap tahunnya banyak diburu wisatawan. Objek pariwisata yang juga bisa menjadi potensi daerah Kabupaten Rembang sekarang, ada sebanyak lebih dari 20 objek Jumlah ini bertambah dengan dibukanya objek wisata Pantai Wates (Pasir Putih), Nyamplung, Karang Jahe, dan Pantai Balongan. Selain itu masih ada lagi objek wisata lain seperti Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Petilasan Sunan Bonang Klentheng Tjoe Hwei Kiong, Klentheng Dasun Vihara Ratanavana Arama, Wisata Sejarah Kota Lasem, Taman Rekreasi Pantai Kartini, Pantai Soka Pulau Gede, Pulau Marongan, Pantai Caruban, Pantai Jatisari, Pantai Binangun, Taman Wisata Mantingan, Bumi Perkemahan Karangsari Park, Puncak Argopuro Lasem, Wana Wisata Sumber Semen, Hutan Mangrove Rembang, Ngulahan park, Puri Berlian Park, Taman Sarinah, Bukit Cendana, Embung Lodan, Embung Panohan.

5. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Kabupaten Rembang

Visi Kabupaten Rembang : Mewujudkan Rembang Sejahtera.

Misi Kabupaten Rembang :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, berbasis ekonomi unggulan, serta mampu mengurangi kemiskinan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

yang lebih profesional;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

b. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah menetapkan misi, antara lain :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi, organisasi dan tata kerja birokrasi;
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial;
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

6. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memberikan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berlokasi di Jalan Pemuda KM 2.5 Rembang. Pelayanan yang diberikan yaitu terkait dengan dokumen pendaftaran penduduk (Kartu Keluarga, KTP-el, Pindah Datang, KIA, dan Identitas Kependudukan Digital) dan Dokumen Pencatatan Sipil seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pencatatan Pengakuan/Pengesahan/Pengangkatan Anak, Pembetulan/Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, serta Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Saat ini Pengajuan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang bisa diajukan melalui 294 Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang. Seluruh Kecamatan (14 Kecamatan) di Kabupaten Rembang juga telah memiliki alat rekam dan cetak KTP-elektronik. Kedua hal ini merupakan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat di Kabupaten Rembang.

BAB III
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

1. Kuantitas Penduduk

Kuantitas Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil demografis, seperti Fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi/perpindahan penduduk. Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Penduduk besar menjadi keuntungan tersendiri bagi suatu wilayah dalam hal melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dari segi kuantitas atau jumlahnya dapat diuraiakan menurut jumlah absolut dan relatifnya, sebaran atau distribusinya, dan berdasarkan karakter demografinya. Dalam Bab III ini akan di bahas mengenai komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk menurut karakteristik demografi.

2. Jumlah Penduduk dan Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak, persebaran dapat dilihat dari jumlah dan proposi penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk dan capai pertumbuhan penduduk.

a. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk dan data-data yang lain dalam buku profil ini diperoleh dari Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2 yang bersumber dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan yang memiliki 287 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 tercatat sebesar 669.145 jiwa yang terdiri 335.857 jiwa laki-laki (50,19%) dan 333.288 jiwa perempuan (49,81%). Hal ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 3.644 jiwa jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
Distribusi Penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	SUMBER	18.970	5,65%	19.276	5,78%	38.246	5,71%
2	BULU	14.569	4,34%	14.470	4,34%	29.039	4,34%
3	GUNEM	12.733	3,79%	12.627	3,79%	25.360	3,79%
4	SALE	20.103	5,98%	19.875	5,96%	39.978	5,97%
5	SARANG	32.753	9,75%	31.723	9,52%	64.476	9,63%
6	SEDAN	29.636	8,82%	28.729	8,62%	58.365	8,72%
7	PAMOTAN	26.284	7,82%	25.750	7,72%	52.034	7,77%
8	SULANG	20.318	6,05%	20.328	6,10%	40.646	6,07%
9	KALIORI	21.878	6,51%	22.369	6,71%	44.247	6,61%
10	REMBANG	46.412	13,82%	46.980	14,10%	93.392	13.96%
11	PANCUR	16.149	4,81%	15.998	4,80%	32.147	4,80%
12	KRAGAN	34.278	10,20%	33.806	10,14%	68.084	10,17%
13	SLUKE	15.457	4,60%	15.264	4,58%	30.721	4,59%
14	LASEM	26.317	7,83%	26.093	7,83%	52.410	7,83%
TOTAL		335.857	100%	333.288	100%	669.145	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Kecamatan Rembang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 93.392 jiwa (13,96%) dari total penduduk Kabupaten Rembang, disusul terbesar selanjutnya adalah Kecamatan Kragan dengan penduduk sebesar 68.084 jiwa (10,17%) dari total penduduk. Sedangkan untuk distribusi penduduk Kecamatan Gunem adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 25.360 jiwa (3,79%) dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang.

b. Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km^2) dengan mengetahui kepadatan penduduk dapat diketahui konsentrasi penduduk pada suatu wilayah untuk digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan pemerataan persebaran penduduk misalnya melalui imigrasi atau transmigrasi.

Tabel 3.2
Rasio Kepadatan Penduduk Persentase Jumlah Total Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	N	%		
1	33.17.01	SUMBER	38.246	5,71%	78,20	489,08
2	33.17.02	BULU	29.039	4,34%	101,10	287,23
3	33.17.03	GUNEM	25.360	3,79%	84,73	299,30
4	33.17.04	SALE	39.978	5,97%	109,01	366,74
5	33.17.05	SARANG	64.476	9,63%	92,86	694,33
6	33.17.06	SEDAN	58.365	8,72%	87,37	668,02
7	33.17.07	PAMOTAN	52.034	7,77%	80,60	645,58
8	33.17.08	SULANG	40.646	6,07%	84,81	479,26
9	33.17.09	KALIORI	44.247	6,61%	61,72	716,90
10	33.17.10	REMBANG	93.392	13.96%	61,71	1.513,40
11	33.17.11	PANCUR	32.147	4,80%	43,00	747,6
12	33.17.12	KRAGAN	68.084	10,17%	67,08	1014,97
13	33.17.13	SLUKE	30.721	4,59%	38.28	802,53
14	33.17.14	LASEM	52.410	7,83%	46,23	1.133,68
Total			**669.145**	100%	1036,70	645,46

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Luas wilayah Kabupaten Rembang tercetak sebesar 1036,70 km² dengan wilayah pemukiman cukup padat berada di Kecamatan Rembang. Berdasarkan persebaran wilayah pada tabel 3.2 diketahui bahwa Kecamatan Rembang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.513,40 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Bulu dengan kepadatan sebesar 287,23 jiwa/km².

c. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi penduduk suatu daerah selama periode tertentu sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Indikator laju pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk melihat kecenderungan jumlah penduduk di masa mendatang.

Tabel 3.3
Angka Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Tahun 2024	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Angka pertumbuhan penduduk
	Kode	Nama			
1	33.17.01	SUMBER	38.026	38.246	0.58
2	33.17.02	BULU	28.904	29.039	0.47
3	33.17.03	GUNEM	25.213	25.360	0.58
4	33.17.04	SALE	39.862	39.978	0.29
5	33.17.05	SARANG	63.900	64.476	0.90
6	33.17.06	SEDAN	57.984	58.365	0.66
7	33.17.07	PAMOTAN	51.675	52.034	0.69
8	33.17.08	SULANG	40.440	40.646	0.51
9	33.17.09	KALIORI	44.005	44.247	0.55
10	33.17.10	REMBANG	93.237	93.392	0.17
11	33.17.11	PANCUR	31.976	32.147	0.53
12	33.17.12	KRAGAN	67.497	68.084	0.87
13	33.17.13	SLUKE	30.579	30.721	0.46
14	33.17.14	LASEM	52.203	52.410	0.39
Total			**665.501**	**669.145**	**0,55**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Dari tabel 3.3 terlihat bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 0,55 persen Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2025 termasuk dalam kategori rendah atau lambat yakni berkisar antara 0- 1%. Jika dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Sarang merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni 0,90 persen, diikuti Kecamatan Kragan yakni 0,87 persen, dan Kecamatan Rembang merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yakni 0,17 persen.

3. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian. Data awal yang dipakai adalah merupakan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025.

a. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk yang sering digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	**0-4**	20.819	6.20	19.629	5.89	40.448	6.04
2	**5-9**	24.947	7.43	23.576	7.07	48.523	7.25
3	**10-14**	25.638	7.63	23.812	7.14	49.450	7.39
4	**15-19**	24.595	7.32	22.970	6.89	47.565	7.11
5	**20-24**	24.443	7.28	23.545	7.06	47.988	7.17
6	**25-29**	24.749	7.37	24.089	7.23	48.838	7.30
7	**30-34**	24.361	7.25	23.829	7.15	48.190	7.20
8	**35-39**	23.672	7.05	23.949	7.19	47.621	7.12
9	**40-44**	25.633	7.63	25.617	7.69	51.250	7.66
10	**45-49**	25.481	7.59	25.247	7.58	50.728	7.58
11	**50-54**	22.369	6.66	22.590	6.78	44.959	6.72
12	**55-59**	20.017	5.96	20.774	6.23	40.791	6.10
13	**60-64**	17.435	5.19	18.363	5.51	35.798	5.35
14	**65-69**	14.089	4.19	15.155	4.55	29.244	4.37

15	**70-74**	9.280	2.76	8.669	2.60	17.949	2.68
16	**>=75**	8.329	2.48	11.474	3.44	19.803	2.96
	Jumlah	**335.857**		**333.288**		**669.145**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Tabel 3.4 merupakan gambaran lengkap penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Rembang berdasar Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 semester 2. Pada tabel 3.4 secara umum pada kelompok umur muda jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tabel 3.4 menggambarkan komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar yang berada pada penduduk berumur 40-44 tahun yakni 51.250 jiwa (7,66%). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki usia kerja yang terbesar berada pada kelompok umur 40 – 44 tahun, gambaran yang sama untuk penduduk perempuan. Untuk kelompok usia diatas 50 tahun jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, hal ini menandakan bahwa secara tidak langsung usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada usia harapan hidup laki-laki. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin tersebut dapat digambarkan dalam

Gambar 3.1
Piramida Penduduk Kab. Rembang Tahun 2025

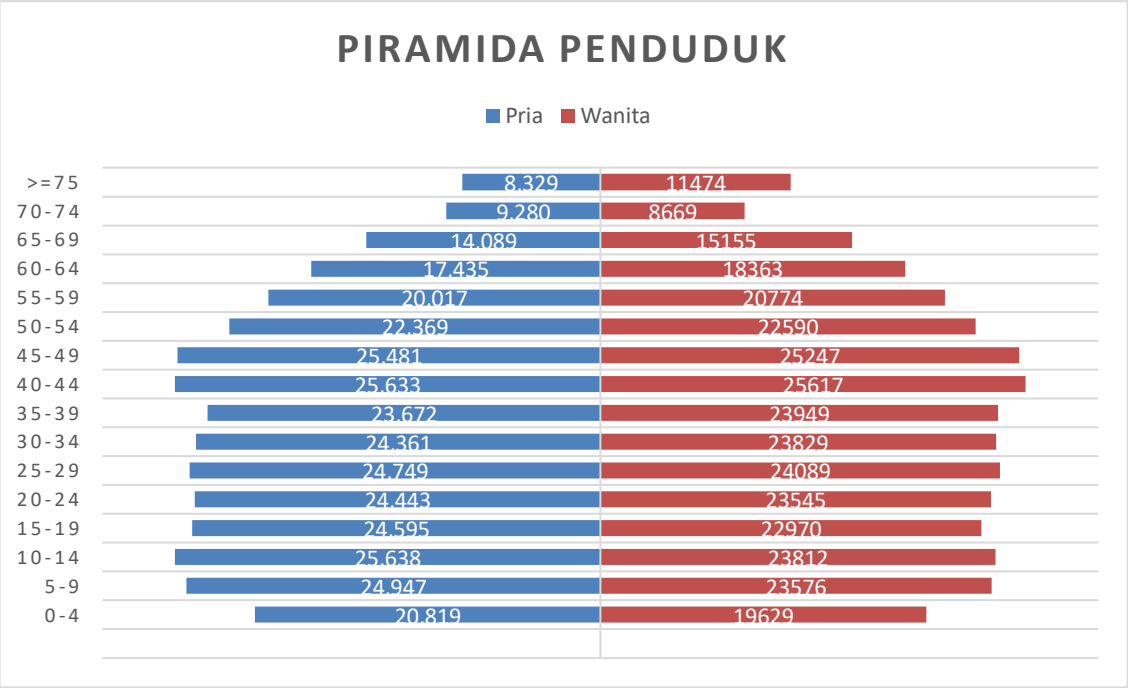

Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada gambar 3.1 Piramida penduduk Kabupaten Rembang menunjukkan struktur penduduk konstruktif dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil walaupun masih terlihat lebar. Ini menunjukan angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 40-44 tahun menunjukkan jumlah yang besar. Diduga kelompok umur 40-44 tahun ini adalah penduduk Kabupaten Rembang ditambah dengan migran yang masuk ke Kabupaten Rembang untuk bekerja atau sekolah. Penduduk lansia 70-74 (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai di antisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

b. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* adalah suatu angka yang menunjukan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang

berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, dalam bidang pendidikan harus berwawasan gender dengan memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Selain itu, informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan data DKB tahun 2025 secara total diketahui sejumlah 669.145 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki mencapai 335.857 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 333.288 jiwa. Angka sex ratio diketahui sebesar 100,77 persen yang berarti di setiap 100 perempuan akan terdapat 100-101 penduduk laki-laki.

Tabel 3.5

Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	**0-4**	20.819	19.629	40.448	106.06
2	**5-9**	24.947	23.576	48.523	105.82
3	**10-14**	25.638	23.812	49.450	107.67
4	**15-19**	24.595	22.970	47.565	107.07
5	**20-24**	24.443	23.545	47.988	103.81
6	**25-29**	24.749	24.089	48.838	102.74
7	**30-34**	24.361	23.829	48.190	102.23
8	**35-39**	23.672	23.949	47.621	98.843
9	**40-44**	25.633	25.617	51.250	100.06
10	**45-49**	25.481	25.247	50.728	100.93
11	**50-54**	22.369	22.590	44.959	99.022
12	**55-59**	20.017	20.774	40.791	96.356
13	**60-64**	17.435	18.363	35.798	94.946
14	**65-69**	14.089	15.155	29.244	92.966
15	**70-74**	9.280	8.669	17.949	107.05
16	**>=75**	8.329	11.474	19.803	72.59
Total		**335.857**	**333.288**	**669.145**	**100,77**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Dari tabel 3.5 jika dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk laki-laki lebih besar pada kelompok umur tua yaitu 10-14 tahun, disusul kelompok umur 15-19 tahun, 70-74 tahun,

kelompok umur anak 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Jika dilihat pada kelompok umur 10-14 tahun adalah 107,67 yang artinya terdapat 107 lansia berjenis kelamin laki-laki dari 100 lansia perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan hal ini sesuai jika dilihat dari Sex Ratio kelompok umur 0-4 tahun yaitu 106,06.

c. Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih. Rasio ketergantungan menunjukan beban yang harus ditanggung penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun atau lebih). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	0-14	71.404	21.26	67.017	20.11	138.421	20.69
2	15-64	232.755	69.30	230.973	69.30	463.728	69.30
3	>64	31.698	9.44	35.298	10.59	66.996	10.01
		335.857		**333.288**		**669.145**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Dari tabel 3.6 nampak bahwa 69,30% penduduk Kabupaten Rembang merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang

berpotensi sebagai modal dasar pembangunan sekaligus penggerak roda ekonomi bangsa. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk belum produktif (0-14 tahun) sebesar 20,69% dan penduduk tidak produktif (65 tahun atau lebih) sebesar 10,01%.

Jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah penduduk produktif laki-laki lebih besar daripada perempuan. Rasio ketergantungan total Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 44,30% angka ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Rembang mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan total Kabupaten Rembang jika dirinci jenis kelamin, dari tabel 3.6 terlihat bahwa rasio ketergantungan perempuan hampir sama dengan rasio ketergantungan laki- laki.

4. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

Komposisi penduduk adalah pengelompokkan penduduk atas variabel–variabel tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokkan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama (Said Rusli dalam Bagoes, Mantra, 2000: 23). Pengelompokan penduduk atau komposisi penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial merupakan pengelompokkan penduduk menurut kriteria sosial seperti pendidikan, pekerjaan, agama, perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam Bab Kuantitas ini yang akan dibahas adalah berkaitan dengan perkawinan.

a. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, lama kawin akan didapat estimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama juga berkaitan dengan resiko perempuan hamil dan melahirkan.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	Cerai Mati	8.229	2,45%	34.654	10,40%	42.883	6,41%
2	Cerai Hidup	5.815	1,73%	8.043	2,41%	13.858	2,07%
3	Kawin	175.714	52,32%	177.302	53,20%	353.016	52,76%
4	Belum Kawin	146.099	43,50%	113.289	33,99%	259.388	38,76%
		335.857		**333.288**		**669.145**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Pada tabel 3.7 proporsi penduduk perempuan berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar pada penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai, baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan, apabila perempuan tersebut sudah mandiri secara ekonomi.

Tabel 3.8
Angka Perkawinan Sesuai Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Berstatus Kawin	Angka Perkawinan
		Pria	Wanita	Jumlah		
1	15-19	24.595	22.970	47.565	288	6.05
2	20-24	24.443	23.545	47.988	9.195	191.61
3	25-29	24.749	24.089	48.838	29.267	599.27
4	30-34	24.361	23.829	48.190	39.056	810.46
5	35-39	23.672	23.949	47.621	41.985	881.65
6	40-44	25.633	25.617	51.250	45.983	897.23
7	45-49	25.481	25.247	50.728	45.345	893.89
8	50-54	22.369	22.590	44.959	39.240	872.80
9	55-59	20.017	20.774	40.791	33.939	832.02
10	60-64	17.435	18.363	35.798	27.955	780.91
11	65-69	14.089	15.155	29.244	20.571	703.43
12	70-74	9.280	8.669	17.949	11.287	628.84
13	>=75	8.329	11.474	19.803	8.905	449.68
	Total	**264.453**	**266.271**	**530.724**	**353.016**	**665,16**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa penduduk berstatus kawin pada Kabupaten Rembang berjumlah 353.016 jiwa dari 530.724 penduduk

usia 15-75 tahun lebih. Penduduk berstatus kawin didominasi oleh penduduk usia 40-44 Tahun yakni 45.983 jiwa dari total 51.250 penduduk usia 40-44 tahun. Sementara pada tabel 3.7 penduduk laki-laki berstatus belum kawin (146.099 jiwa) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan belum kawin (113.289 jiwa). Dari tabel di atas dapat diasumsikan bahwa penduduk Kabupaten Rembang baik laki-laki maupun perempuan melangsungkan pernikahan di usia yang cukup matang.

b. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage/SMAM*)

Singulate Mean Age at Marriage adalah perkiraan (estimasi) untuk rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umut kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Tabel 3.9
Persentase Lajang

No	Kelompok Umur	Total		
		Belum Kawin	Jumlah Penduduk	% Lajang
1	15-19	47.268	47.565	99,38
2	20-24	38.594	47.988	80,42
3	25-29	18.659	48.838	38,21
4	30-34	7.402	48.190	15,36
5	35-39	3.412	47.621	7,16
6	40-44	2.209	51.250	4,31
7	45-49	1.261	50.728	2,49
8	50-54	846	44.959	1,88
9	55-59	569	40.791	1,39
10	60-64	375	35.798	1,05
11	65-69	188	29.244	0,64
12	70-74	96	17.949	0,53
13.	>75	88	19.803	0,44
	Jumlah	**120.967**	**530.724**	**22,79**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025 diolah

Angka perkawinan pertama ini dalam data persentase lajang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kabupaten Rembang telah menunda perkawinan karena diduga mereka lebih memilih melanjutkan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Angka ini juga mencerminkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Rembang saat memutuskan untuk membina rumah tangga telah matang secara mental dan reproduksi.

Tingginya angka rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan yang dihasilkan dari data pelayanan SIAK terolah, dikarenakan data penduduk yang berstatus kawin yang ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penduduk yang mempunyai bukti perkawinan yang sah menurut Negara. Ada kemungkinan pula penduduk muslim yang berstatus kawin sah secara agama maupun Negara, namun belum melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau diduga penduduk kawin hanya sah menurut agama atau adat istiadat sehingga mereka tidak tercatat dalam database kependudukan.

5. Kelahiran (Fertilitas)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Kelahiran (fertilitas). Fertilitas itu sendiri merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*). Atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang dimaksud disini hanya mencakup kelahiran hidup, jadi bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fekunditas, sebaliknya, merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti kata sterilitas. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya.

Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia. Istilah fertilitas juga sering disebut dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan

paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati (*Still Birth*) yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Jumlah kelahiran adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu dan di suatu wilayah. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu anak dan pembangunan keluarga.

a. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan jumlah kelahiran hidup pada banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran mortalitas yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar. Hal ini dikarenakan pada pengukuran ini tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang tidak beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan lansia).

Tabel 3.10
Angka Kelahiran Kasar

No	Kecamatan		Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Kasar
	Kode	Nama		Periode Sebelum	Periode Sekarang	Pertengahan Periode	
1	33.17.01	SUMBER	341	38.026	38.246	38.197	8,93
2	33.17.02	BULU	273	28.904	29.039	29.001	9,41
3	33.17.03	GUNEM	244	25.213	25.360	25.328	9,63
4	33.17.04	SALE	299	39.862	39.978	39.940	7,49
5	33.17.05	SARANG	714	63.900	64.476	64.192	11,12
6	33.17.06	SEDAN	591	57.984	58.365	58.264	10,14
7	33.17.07	PAMOTAN	571	51.675	52.034	51.913	11

8	33.17.08	SULANG	419	40.440	40.646	40.590	10,32
9	33.17.09	KALIORI	414	44.005	44.247	44.202	9,37
10	33.17.10	REMBANG	842	93.237	93.392	93.348	9,02
11	33.17.11	PANCUR	342	31.976	32.147	32.066	10,67
12	33.17.12	KRAGAN	704	67.497	68.084	67.838	10,38
13	33.17.13	SLUKE	289	30.579	30.721	30.665	9,42
14	33.17.14	LASEM	541	52.203	52.410	52.358	10,33
Total			**6.584**	**665.501**	**669.145**	**667.902**	**9,86**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Pada tabel 3.10 jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang pada tahun 2025 adalah 6.584 jiwa, dimana jumlah kelahiran tertinggi pada Kecamatan Rembang yaitu 842 jiwa. Kecamatan dengan jumlah kelahiran paling rendah pada Tahun 2024 adalah Kecamatan Gunem yang tercatat 244 jiwa.

Angka kelahiran kasar (CBR) Kabupaten Rembang adalah 9,86 yang bermakna dari 1.000 penduduk pada tahun pertengahan terjadi 9-10 kelahiran hidup. Angka kelahiran kasar paling tinggi adalah Kecamatan Sarang yaitu 11,12. Hal ini berarti pada tahun 2025 di Kecamatan Pancur setiap 1.000 penduduk pertengahan tahun tahun terjadi 11 kelahiran hidup, sedangkan Kecamatan dengan angka kelahiran kasar terendah adalah Kecamatan Sale yaitu 7,49, dimana berarti 7 kelahiran hidup per 1000 penduduk pada pertengahan tahun dilihat dari tabel 3.10. Tingginya jumlah angka kelahiran kasar tidak selalu diikuti dengan tingginya jumlah kelahiran, hal ini dikarenakan jumlah penduduk keseluruhan turut mempengaruhi perhitungan angka kematian kasar tersebut.

6. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau mortalitas merupakan salah satu komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang mempengaruhi jumlah struktur dan komposisi penduduk. Pengaruh kematian adalah mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Kematian dapat terjadi pada penduduk laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usia remaja, usia dewasa maupun usia tua. Besar kecilnya kematian menurutkarakteristik tersebut berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perubahan struktur umur dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga

merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

a. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*)

Jumlah kematian menunjukkan kematian yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi tentang jumlah kematian digunakan untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Angka Kematian Kasar merupakan angka yang menunjuk besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.Data mengenai jumlah penduduk yang meninggal di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya tercatat dalam *database* SIAK. Masih kurangnya kesadaran penduduk untuk segera melaporkan adanya peristiwa kematian di lingkungan keluarganya menjadi salah satu penyebab pelaporan kematian ini tidak lengkap dan terbarukan (*up to date*).

Tabel 3.11
Jumlah Kematian Kasar Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kematian	Angka Kematian Kasar
		Awal Tahun	Akhir Tahun	Tengah Tahun		
1	SUMBER	38.026	38.246	38.197	253	6,62
2	BULU	28.904	29.039	29.001	149	5,14
3	GUNEM	25.213	25.360	25.328	123	4,86
4	SALE	39.862	39.978	39.940	298	7,46
5	SARANG	63.900	64.476	64.192	325	5,06
6	SEDAN	57.984	58.365	58.264	255	4,38
7	PAMOTAN	51.675	52.034	51.913	378	7,28
8	SULANG	40.440	40.646	40.590	275	6,78
9	KALIORI	44.005	44.247	44.202	344	7,78
10	REMBANG	93.237	93.392	93.348	882	9,45
11	PANCUR	31.976	32.147	32.066	219	6,83
12	KRAGAN	67.497	68.084	67.838	412	6,07
13	SLUKE	30.579	30.721	30.665	183	5,97
14	LASEM	52.203	52.410	52.358	437	8,35
TOTAL		**665.501**	**669.145**	**667.902**	**4.533**	**6,79**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Jumlah kematian pada tahun 20255 di Kabupaten Rembang adalah 4.533 jiwa. Pada tahun 2025 jumlah pencatatan kematian paling banyak menurut wilayah di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Rembang sebesar 882 jiwa. Sementara itu jumlah

pencatatan kematian paling rendah adalah Kecamatan Gunem sebesar 123 jiwa. Tinggi rendahnya jumlah pencatatan kematian ini belum bisa menjadi parameter yang menunjukkan baik buruknya derajat kesehatan di Kabupaten Rembang karena penyebab kematian tidak teridentifikasi dengan jelas akibat ketiadaan data yang akurat.

Angka kematian kasar Kabupaten Rembang pada tahun 2025 adalah 6,79 Hal ini bermakna bahwa pada tahun 2025 di Kabupaten Rembang terdapat 6-7 orang yang meninggal dari setiap 1.000 penduduk. Pada tahun 2025 jumlah kematian tertinggi terjadi di Kecamatan Rembang dengan angka kematian kasar 9,45 atau 9 kematian setiap 1.000 penduduk. Selanjutnya angka kematian terendah adalah Kecamatan Sedan dengan angka kematian kasar 4,38 atau 4 kematian per 1.000 penduduk. Angka kematian atau jumlah kematian yang tinggi bila tidak dikarenakan jumlah penduduk yang memang tinggi mengindikasikan terdapat masalah yang memicu timbulnya penyebab-penyebab kematian. Oleh sebab itu, temuan ini menjadi pekerjaan rumah untuk menulusuri penyebab kematian di masing-masing wilayah.

BAB IV
KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan berkaitan dengan mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan melek huruf dan rata- rata lama sekolah, kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

1. Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penduduk dari aspek kesehatan adalah kelahiran dan kematian. Kedua indikator ini mempengaruhi perubahan jumlah dan struktur penduduk.

Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*) adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun (0-4 tahun) dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah

kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel 4.1 dapat dilihat ada 40.448 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kabupaten Rembang, sedangkan jumlah perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 169.246 jiwa, sehingga dapat memperlihatkan diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 23 - 24 anak balita.

Tabel 4.1
Child Woman Ratio (CWR) Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia 15-49 tahun	Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun	Child Woman Ratio (CWR)
1	SUMBER	9.533	2.123	22,27
2	BULU	7.174	1.664	23,19
3	GUNEM	6.380	1.335	20,92
4	SALE	9.903	2.153	21,74
5	SARANG	16.480	4.335	26,30
6	SEDAN	14.692	3.901	26,55
7	PAMOTAN	13.174	3.273	24,84
8	SULANG	10.127	2.358	23,28
9	KALIORI	11.164	2.583	23,14
10	REMBANG	24.120	5.414	22,45
11	PANCUR	8.116	1.966	24,22
12	KRAGAN	17.470	4.241	24,28
13	SLUKE	7.740	1.814	23,44
14	LASEM	13.173	3.288	24,96
TOTAL		**169.246**	**40.448**	**23,90**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengembangan potensi penduduk dapat dikembangkan. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, yaitu kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka partisipasi sekolah kasar yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK)

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM)		Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK)	
	2024	2025	2024	2025
SD/MI/Sederajat	97,84	98,10	103,5	104,10
SMP/MTs/Sederajat	78,20	79,50	90,10	91,70
SMA/SMK/MA/Sederajat	65,29	67,80	78,90	80,20

Sumber : BPS Rembang, Tahun 2025,

3. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ada otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Target Nasional Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, tenaga kerja yang terserap mencapai 12 juta tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para

pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja *(Manpower)* merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Tabel 4.3

Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk 15 - 64 Tahun)		Jumlah Penduduk		Persentase Tenaga Kerja
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	26.603	5,74%	38.246	5,71%	69,56%
2	33.17.02	BULU	20.281	4,37%	29.039	4,34%	69,84%
3	33.17.03	GUNEM	17.723	3,82%	25.360	3,79%	69,88%
4	33.17.04	SALE	27.964	6,03%	39.978	5,97%	70,24%
5	33.17.05	SARANG	44.547	9,61%	64.476	9,63%	69,95%
6	33.17.06	SEDAN	40.083	8,64%	58.365	8,72%	68,68%
7	33.17.07	PAMOTAN	35.847	7,73%	52.034	7,77%	68,89%
8	33.17.08	SULANG	27.995	6,04%	40.646	6,07%	68,87%

9	33.17.09	KALIORI	30.743	6,63%	44.247	6,61%	69,48%
10	33.17.10	REMBANG	65.336	14,10%	93.392	13.96%	69,96%
11	33.17.11	PANCUR	22.043	4,75%	32.147	4,80%	68,57%
12	33.17.12	KRAGAN	47.505	10,2%	68.084	10,17%	69,77%
13	33.17.13	SLUKE	21.214	4,57%	30.721	4,59%	69,05%
14	33.17.14	LASEM	35.844	7,73%	52.410	7,83%	68,39%
TOTAL			463.728	100%	669.145	100%	69,30%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Dari 669.145 jiwa penduduk Kabupaten Rembang per 31 Desember 2025, 463.728 orang (69,30% dari total penduduk) merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun) seperti terlihat pada tabel 4.3. Jumlah penduduk usia kerja ini cukup besar dan sesuai dengan hukum ekonomi bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi.

Jika diperhatikan menurut kecamatan dari tabel 4.3 terlihat bahwa Kecamatan Sale memiliki presentase tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 70,24 persen sedangkan Kecamatan Lasem merupakan kecamatan dengan persentase tenaga kerja terkecil yakni 68,39 persen. Besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Rembang akan semakin besar pula kebutuhan lowongan pekerjaan (kesempatan kerja).

4. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

a. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data yang diolah adalah hasil registrasi kependudukan melalui SIAK berguna sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang cacat), serta dalam memberikan pelayanan dasar dan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 4.4
Penduduk Penyandang Disabilitas Tahun 2025

No	Kecamatan		Angka Penyandang Cacat		Jumlah Penduduk		Persentase
	Kode	Nama	N	%	N	%	%
1	33.17.01	SUMBER	84	6,15%	38.246	5,71%	0,22
2	33.17.02	BULU	88	6,44%	29.039	4,34%	0,30
3	33.17.03	GUNEM	69	5,05%	25.360	3,79%	0,27
4	33.17.04	SALE	67	4,90%	39.978	5,97%	0,17
5	33.17.05	SARANG	55	4,03%	64.476	9,63%	0,09
6	33.17.06	SEDAN	59	4,32%	58.365	8,72%	0,10
7	33.17.07	PAMOTAN	111	8,13%	52.034	7,77%	0,21
8	33.17.08	SULANG	125	9,15%	40.646	6,07%	0,31
9	33.17.09	KALIORI	71	5,20%	44.247	6,61%	0,16
10	33.17.10	REMBANG	270	19,80%	93.392	13.96%	0,29
11	33.17.11	PANCUR	71	5,20%	32.147	4,80%	0,22
12	33.17.12	KRAGAN	92	6,73%	68.084	10,17%	0,14
13	33.17.13	SLUKE	40	2,93%	30.721	4,59%	0,13
14	33.17.14	LASEM	164	12%	52.410	7,83%	0,31
Jumlah			1.366	100.00%	669.145	100.00%	0,20%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Pada tahun 2025 jumlah penyandang cacat di Kabupaten Rembang sebanyak 1.366 orang. Angka penyandang cacat terbanyak berada di Kecamatan Rembang dengan jumlah 270 penyandang cacat. Sedangkan Kecamatan dengan penyandang cacat terendah adalah Kecamatan Sluke, dengan jumlah penyandang cacat sebanyak 40 orang. Pelayanan adminduk adalah pelayanan inklusif mencakup pelayanan terhadap semua penduduk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Rembang.

BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu natalitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan mobilitas penduduk. Istilah mobilitas penduduk diartikan menjadi gerak penduduk seperti yang dinyatakan oleh Mantra (1985:15) "Mobilitas penduduk yaitu semua gerak penduduk dalam (waktu tertentu dan batas (wilayah administrasi tertentu seperti batas propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya". Peranan mobilitas penduduk terhadap laju pertumbuhan penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda-beda.

Mobilitas penduduk memiliki kaitan erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk dan begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas dari pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Mobilitas dilakukan untuk mempertahankan hidup dan disebabkan karena adanya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahan penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen (migrasi) dan ada yang bersifat non permanen. Pada dasarnya penduduk yang melakukan mobilitas dari wailayah satu ke wilayah lainnya bertujuan untuk menetap di wilayah yang dikunjunginya. Namun ada kalanya mereka berpindah untuk sementara waktu baik dalam waktu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin lebih lama lagi. Mobilitas penduduk semacam ini disebut mobilitas penduduk non permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan mobilitas penduduk non permanen

dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Mobilitas permanen atau migrasi itu terbagi menjadi 2 (dua) yakni migrasi internasional dan migrasi nasional (dalam negeri). Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah migrasi nasional baik migrasi masuk maupun keluar.

Tabel 5.1
Angka Migrasi Masuk Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Kabupaten Rembang	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Penduduk Pertengahan Periode	Angka Migrasi Masuk
1	Kab. Rembang	10.479	667.902	15,69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Pada tahun 2025 menunjukkan jumlah migrasi masuk (penduduk yang datang) ke Kabupaten Rembang jumlahnya mencapai 10.479 jiwa. Dari tabel 5.1 terlihat bahwa angka migrasi masuk Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 15,69 jiwa yang berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kabupaten Rembang terdapat 15 - 16 penduduk masuk ke Kabupaten Rembang.

Tabel 5.2
Angka Migrasi Keluar Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Kabupaten Rembang	Jumlah Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk Pertengahan Periode	Angka Migrasi Keluar
1	Kab. Rembang	11.865	667.902	17,76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Dari tabel 5.2 nampak bahwa migrasi penduduk yang keluar Kabupaten Rembang (penduduk yang keluar/pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah dan datang tahun 2025 adalah 11.865 jiwa. Tabel 5.2 juga menunjukkan angka migrasi keluar penduduk Kabupaten Rembang tahun 2025, angka migrasi keluar dari Kabupaten Rembang tahun 2025 sebesar 17,76 yang menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk Kabupaten Rembang terdapat 17 - 18 penduduk keluar dari Kabupaten Rembang.

Tabel 5.3
Angka Migrasi Neto Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Kabupaten Rembang	Jumlah Migrasi			Jumlah Penduduk Pertengahan Periode	Angka Migrasi Neto
		Masuk	Keluar	Selisih		
1	Kab. Rembang	10.479	11.865	-1386	667.902	-2,07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Dari tabel 5.3 di atas terlihat bahwa migrasi yang terjadi di Kabupaten Rembang adalah migrasi negatif, dimana migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar.

Pada hakikatnya migrasi penduduk merupakan cermin dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk yang berada di daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah cenderung akan berpindah menuju daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen Kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW. Manfaat dokumen kependudukan antara lain :

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok);
2. Memberikan kepastian hukum;
3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya;

4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tahun 2011 mulai diterapkan program KTP elektronik, adapun program KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Belum adanya basis data terpadu tingkat nasional memugkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Hal tersebut memberikan peluang kepada oknum untuk berbuat curang antara lain untuk:

1. Menghindari pajak;
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota;
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya;
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris);
5. Memalsukan dan menggandakan ktp.

Dalam rangka pelaksanaan *e-Government* serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP/KTP-el. KTP-el selain berlaku secara Nasional juga berlaku seumur hidup, sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup. "Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011

berlaku seumur hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemen data.

Tabel 6.1
Persentase Kepemilikan KTP-el

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki KTP		Jumlah Penduduk Wajib KTP		Persentase Kepemilikan KTP
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	29.681	5,86	29.939	5,86	99,14%
2	33.17.02	BULU	22.558	4,45	22.755	4,45	99,13%
3	33.17.03	GUNEM	19.948	3,94	20.114	3,93	99,17%
4	33.17.04	SALE	31.056	6,13	31.358	6,13	99,04%
5	33.17.05	SARANG	47.638	9,41	48.203	9,43	98,83%
6	33.17.06	SEDAN	43.342	8,56	43.880	8,58	98,77%
7	33.17.07	PAMOTAN	39.009	7,70	39.329	7,69	99,19%
8	33.17.08	SULANG	31.433	6,21	31.654	6,19	99,30%
9	33.17.09	KALIORI	33.982	6,71	34.260	6,70	99,19%
10	33.17.10	REMBANG	70.293	13,9	70.914	13,9	99,12%
11	33.17.11	PANCUR	24.190	4,78	24.378	4,77	99,23%
12	33.17.12	KRAGAN	51.049	10,1	51.554	10,1	99,02%
13	33.17.13	SLUKE	23.273	4,59	23.482	4,59	99,11%
14	33.17.14	LASEM	39.044	7,71	39.412	7,71	99.07%
TOTAL			506.496		511.232		99,07%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa dari 511.232 jiwa wajib KTP di Kabupaten Rembang, 506.496 jiwa atau 99,07 persen sudah memiliki KTP-el.

2. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

a. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta terebut dijelaskan

tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 6.2
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran		Jumlah Penduduk		Persentase (%) Kepemilikan Akta Kelahiran
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	19.399	5,20	38.246	5,71	50,72
2	33.17.02	BULU	15.166	4,07	29.039	4,34	52,23
3	33.17.03	GUNEM	12.186	3,27	25.360	3,79	48,05
4	33.17.04	SALE	19.283	5,17	39.978	5,97	48,23
5	33.17.05	SARANG	36.057	9,67	64.476	9,63	55,92
6	33.17.06	SEDAN	32.782	8,79	58.365	8,72	56,17
7	33.17.07	PAMOTAN	32.927	8,83	52.034	7,77	63,28
8	33.17.08	SULANG	21.792	5,84	40.646	6,07	53,61
9	33.17.09	KALIORI	24.001	6,44	44.247	6,61	54,24
10	33.17.10	REMBANG	57.460	15,4	93.392	13.96	61,53
11	33.17.11	PANCUR	18.915	5,07	32.147	4,80	58,84
12	33.17.12	KRAGAN	35.348	9,48	68.084	10,17	51,92
13	33.17.13	SLUKE	16.743	4,49	30.721	4,59	54,50
14	33.17.14	LASEM	30.873	8,28	52.410	7,83	58,91
Jumlah			372.932	100%	669.145	100%	55,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Tabel. 6.2 menggambarkan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Rembang terhadap total penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan data yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten Rembang, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Rembang hanya 55,73% (372.932 jiwa) sedangkan 296.213 penduduk (44,27%) tidak mempunyai akta kelahiran. Jika dilihat menurut Kecamatan, maka sebagian besar Kecamatan persentase kepemilikan Akta Kelahiran diatas 50 persen. Masih adanya sejumlah penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dindukcapil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK.

b. Akta Kematian

Kematian atau mortalitas menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setelah kelahiran hidup. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang mempengaruhi jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi dan peristiwa perdata lainnya.

Tabel 6.3
Persentase Kepemilikan Akta Kematian

No	Kecamatan		Terbit Akta	Terbit Akta	Terbit Akta Jumlah
	Kode	Nama	Laki-Laki	Perempuan	
1	33.17.01	SUMBER	1.666	1.455	3.121
2	33.17.02	BULU	1.009	863	1.872
3	33.17.03	GUNEM	844	659	1.503
4	33.17.04	SALE	1.172	787	1.959
5	33.17.05	SARANG	1.434	989	2.423
6	33.17.06	SEDAN	1.868	1.198	3.066
7	33.17.07	PAMOTAN	2.097	1.644	3.741
8	33.17.08	SULANG	1.351	1.066	2,417
9	33.17.09	KALIORI	1.742	1.359	3.101
10	33.17.10	REMBANG	4.485	3.854	8.339
11	33.17.11	PANCUR	1.179	911	2.090
12	33.17.12	KRAGAN	2.341	1.663	4.004
13	33.17.13	SLUKE	1.159	803	1.962
14	33.17.14	LASEM	1.910	1.474	3.384
15	33.17 --	Tidak diketahui	3.816	3.005	6.821
TOTAL			28.073	21.730	49.803

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah.

Berdasarkan tabel 6.3 diketahui jumlah kematian yang dicatatkan pada tahun 2025 di Kabupaten Rembang adalah 49.803 jiwa. Berdasarkan tabel 6.3 jumlah pencatatan kematian paling banyak di Kabupaten Rembang adalah pencatatan kematian laki-laki sebanyak 28.073 jiwa. Sementara itu jumlah pencatatan kematian perempuan tercatat 21.730 jiwa. Pada poin 15 di tabel 6.3 menunjukan jumlah pencatatan kematian di wilayah Kabupaten Rembang tetapi kode kecamatan atau desa/kelurahan kosong. Tinggi rendahnya jumlah pencatatan kematian ini belum bisa menjadi parameter yang menunjukan baik buruknya derajat kesehatan di Kabupaten Rembang karena penyebab kematian tidak teridentifikasi dengan jelas.

c. Akta Perkawinan

Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel 6.4
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perkawinan		Jumlah Penduduk Berstatus Kawin		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	18.196	6,50	21.902	6,19	83,08%
2	33.17.02	BULU	11.511	4,11	16.214	4,58	70,99%
3	33.17.03	GUNEM	10.845	3,88	14.855	4,20	73,01%
4	33.17.04	SALE	15.417	5,51	21.966	6,21	70,19%
5	33.17.05	SARANG	24.505	8,76	33.970	9,60	72,14%
6	33.17.06	SEDAN	24.518	8,76	30.621	8,65	80,07%
7	33.17.07	PAMOTAN	24.302	8,69	26.651	7,53	91,19%
8	33.17.08	SULANG	18.218	6,51	22.200	6,27	82,06%
9	33.17.09	KALIORI	17.220	6,15	24.224	6,85	71,09%
10	33.17.10	REMBANG	37.488	13,4	45.727	12,9	81,98%
11	33.17.11	PANCUR	13.075	4,67	17.143	4,85	76,27%
12	33.17.12	KRAGAN	30.205	10,8	36.402	10,3	82,98%
13	33.17.13	SLUKE	12.945	4,63	16.474	4,66	78,58%
14	33.17.14	LASEM	21.329	7,62	25.460	7,20	83,77%
Jumlah			279.774	100	353.809	100.00%	79.07%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Tabel 6.4 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan, terlihat bahwa jumlah

penduduk Kabupaten Rembang yang berstatus kawin sebanyak 353.809 orang dan yang tercatat memiliki akta kawin hanya 79,07 persen sedangkan yang tidak memiliki akta kawin persentasenya 20,93 persen (74.035 orang). Hal ini biasa ditemukan diseluruh Indonesia, karena masih ada penduduk yang hanya melakukan perkawinan secara agama, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara. Selain itu juga terdapat penduduk berstatus kawin tidak tercatat yang sebenarnya sudah memiliki akta perkawinan (surat nikah) dari KUA, namun tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel 6.5 menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian di Kabupaten Rembang.

Tabel 6.5

Persentase Kepemilikan Akta Perceraian

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian		Jumlah Penduduk Berstatus Cerai Hidup		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	482	5,51	711	5,31	67,79%
2	33.17.02	BULU	368	4,20	673	5,03	54,68%
3	33.17.03	GUNEM	453	5,17	645	4,82	70,23%
4	33.17.04	SALE	451	5,15	842	6,29	53,56%
5	33.17.05	SARANG	686	7,84	1.191	8,90	57,60%
6	33.17.06	SEDAN	724	8,27	841	6,28	86,09%
7	33.17.07	PAMOTAN	794	9,07	983	7,34	80,77%
8	33.17.08	SULANG	552	6,31	889	6,64	62,09%
9	33.17.09	KALIORI	498	5,69	854	6,38	58,31%
10	33.17.10	REMBANG	1.369	15,6	2.128	15,9	64,33%
11	33.17.11	PANCUR	276	3,15	516	3,85	53,49%
12	33.17.12	KRAGAN	853	9,74	1.249	9,33	68,29%
13	33.17.13	SLUKE	436	4,98	650	4,86	67,08%
14	33.17.14	LASEM	812	9,28	1.216	9,08	66,78%
TOTAL			8.754	100	13.388	100	65,39%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025, diolah

Tabel 6.5 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup dan kepemilikan akta cerai hidup di Kabupaten Rembang terlihat bahwa 13.388 orang yang cerai memiliki akta cerai 8.754 orang dan 4.634 orang tidak memiliki akta cerai. Besarnya penduduk cerai yang tidak memiliki akta perceraian diduga penduduk berstatus cerai hidup ini tidak mencatatkan perceraiannya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian.

Tabel 6.5 juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Rembang yang berstatus cerai hanya 65,39 persen yang memiliki akta cerai dan 34,61 persen tidak memiliki akta cerai. Tingginya persentase penduduk yang berstatus cerai yang tidak memiliki akta cerai diduga mereka tidak mencatatkan perceraiannya terutama penduduk muslim karena yang mengeluarkan surat cerai adalah pengadilan agama. Dengan kecilnya kepemilikan akta baik akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian, maka perlu adanya kebijakan yang berkaitan sosialisasi akan pentingnya mencatatkan peristiwa penting atau kepemilikan akta atau melakukan pemutakhiran data penduduk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang merupakan gambaran perkembangan kependudukan Kabupaten Rembang pada Tahun 2025. Dimana data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersimpan dalam database kependudukan SIAK Kabupaten Rembang bulan Desember Tahun 2025 yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dari OPD-OPD terkait.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan baik nasional maupun daerah dan juga bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.